

BAB III

ELEMEN KONFLIK DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PEREMPUAN

Pada bab sebelumnya sudah dibahas mengenai gambaran konflik yang terjadi di Republik Afrika Tengah (RAT) dan bantuan internasional yang diberikan. Konflik yang terjadi mengalami peningkatan yang sangat signifikan yaitu pada tahun 2013 terjadi 517 kasus dan meningkat pada tahun 2014 sebanyak 2.527 kasus dan meningkat lagi pada tahun 2015 sebanyak 60.208 kasus dan pada tahun 2016 sebanyak 11.110 kasus. Sehingga bab ini akan menjelaskan mengenai mengapa peningkatan tersebut bisa terjadi. Bab ini terdiri dari dua sub-bab. Sub-bab yang pertama akan membahas mengenai elemen konflik yang terdiri dari aktor, tindakan dan inkompatibilitas. Aktor yang terlibat dalam konflik di RAT terdiri dari negara, perempuan dan kelompok pemberontak. Penelitian ini berargumen bahwa terjadinya konflik di RAT dipengaruhi oleh adanya perbedaan tujuan dari tindakan masing-masing aktor.

Pada sub-bab selanjutnya akan dibahas mengenai Teori Pemerkosaan sebagai strategi perang. Dalam teori tersebut melihat perempuan sebagai individu yang lemah dan dapat dijadikan sebagai sasaran perang. Pendekatan ini menggambarkan situasi konflik yang memanfaatkan perempuan sebagai target untuk melemahkan musuh dan merusak tatanan sosial.

3.1. Identifikasi elemen konflik dalam konflik dan KSBG di RAT

Terdapat tiga elemen yang dapat digunakan untuk menganalisis konflik dan Kekerasan Seksual Berbasis Gender (KSBG) di RAT, yaitu; aktor, tindakan dan inkompatibilitas. Konflik terjadi karena adanya sekelompok orang yang terlibat yang menggunakan kekuatannya untuk menghilangkan lawannya dan untuk memperoleh status, kekuasaan dan sumber daya yang diinginkan. Aktor-aktor juga seringkali memilih perang sebagai tindakan untuk mencapai tujuannya. Berjalannya perang juga berada di jalur yang sesuai dengan strategi para aktor (Wallensten, 2002).

Tindakan yang dilakukan oleh para aktor merupakan dasar terjadinya konflik. Setiap aktor yang terlibat dalam konflik yang terjadi di RAT memiliki tujuan yang berbeda. Permasalahan yang ada merupakan ‘motivasi’ dari tindakan yang mereka lakukan, ada kemungkinan bahwa tindakan tersebut tidak dapat dihentikan sampai tujuan dari masing-masing aktor dapat tercapai. Hal tersebut berdampak pada keadaan perempuan di RAT, mereka menjadi korban dari kekerasan yang terjadi.

Sub-bab ini akan menjelaskan mengenai apa kepentingan dari masing-masing aktor yang saling berkaitan, apa hubungan antara kepentingan, posisi dan kebutuhan aktor atau dari posisi yang diklaimnya untuk diwakilkan, karena masing-masing aktor memiliki kepentingan yang menjadi prioritasnya (Wallensten, 2002). Konsep inkompatibilitas sendiri didefinisikan sebagai ketidakmampuan untuk memenuhi tuntutan dari dua atau lebih pihak pada saat yang sama dengan sumber daya yang tersedia. Sumber daya yang dimaksud dapat berupa tanah, modal, sumber daya alam, posisi militer atau posisi politik (Wallensten, 2002). Dalam konflik yang terjadi di RAT, inkompatibilitas terjadi dari masing-masing aktor yaitu pemerintah, perempuan dan kelompok pemberontak. Konflik tidak dapat berakhir sampai tujuan tersebut terpenuhi, diselesaikan atau diakhiri.

A. Negara

Aktor yang pertama berperan dalam konflik ini adalah negara. Negara dari banyak definisi Ilmu Politik menurut Weber, negara merupakan aktor tunggal pengguna kekerasan fisik yang sah di masyarakat (Weber, 1964). Dalam konflik yang terjadi di RAT, negara dalam hal ini adalah pemerintah memiliki kewajiban untuk memberikan pelayanan dan memenuhi kesejahteraan masyarakatnya. Pemerintah RAT belum mampu untuk memberikan layanan kepada masyarakat secara maksimal, lemahnya hukum, pemenuhan kebutuhan dasar masyarakatnya khususnya perempuan dan anak-anak yang tidak terpenuhi. Hal ini terjadi karena konflik yang berjalan dan gejolak politik terus meluas di seluruh bagian negara. Hal ini dibuktikan dengan data kesehatan di RAT yang tidak tersedia di setiap area, dan di setiap level. Hanya ada satu perawat untuk setiap 1.000 penduduk. Usia harapan hidup saat lahir adalah 43 tahun dengan angka kematian anak di kisaran 176 per

1.000 kelahiran; Dua puluh persen anak-anak meninggal sebelum mereka mencapai usia lima tahun, dan sepuluh persen anak-anak di bawah lima tahun menderita gizi buruk (Pasific Prime, 2018).

Gambar 3.1. data krisis kemanusiaan di RAT



Sumber: Global Conflict Tracker, OCHA, UNHCR, UNICEF, WHO, HeRAMS RCA.

Diambil dari website: www.euronews.com

Dari gambar 3.1 menjelaskan bahwa RAT menempati urutan kedua di dunia untuk kematian ibu dan bayi. Satu dari 25 wanita meninggal karena komplikasi terkait dengan kehamilan atau melahirkan. Kesulitan utama yang dihadapi adalah jumlah dokter yang terbatas, Departemen Kesehatan RAT hanya menyediakan satu dokter untuk 116.000 orang. Sejak pecahnya konflik pada tahun 2013, hampir 6.000 orang terbunuh, setengah dari populasi membutuhkan bantuan kemanusiaan dan 690.000 orang mengungsi ke negara tetangga (Pinna, 2018).

RAT juga merupakan negara dengan pengeluaran kesehatan per kapita paling rendah pada tahun 2015 yang hanya mengeluarkan sebanyak 16,64 dolar AS. Padahal pengeluaran kesehatan per kapita rata-rata negara pada tahun 2015 adalah 1029,67 dolar AS (TheGlobalEconomy.com, 2015).

Krisis tersebut juga memberikan dampak negatif terhadap pendidikan untuk perempuan dan anak-anak di RAT. Anak-anak di RAT sulit dalam mengakses pendidikan. Kondisi pendidikan menurut *The Education Cluster Survey* melaporkan bahwa angka partisipasi anak sekolah turun sebanyak 6% pada tahun 2015 dibandingkan dengan tahun 2012 karena tidak beroperasinya sekolah. Alasan utama dari tidak beroperasinya sekolah tersebut karena kurangnya guru yaitu terdapat 49% kasus, kerusakan tempat sebanyak 21% dan kondisi yang tidak aman sebanyak 21%. Selain itu, terdapat 81 kasus serangan yang terjadi terhadap sistem yang dilaporkan sejak tahun 2017 (GPE, 2018). Guru yang tersedia di wilayah pedesaan dan memenuhi syarat untuk mengajar lebih memilih untuk melarikan diri dari konflik yang kemudian digantikan oleh guru-guru tua yang tidak memenuhi syarat.

Saat ini, tingkat melek huruf remaja dan anak-anak di RAT tetap salah satu yang terendah di Afrika, dengan 37 persen anak-anak berusia 15 hingga 24 mampu membaca dan menulis. Namun, tingkat melek huruf laki-laki di negara itu sebesar 51 persen adalah dua kali lipat dari tingkat melek huruf perempuan sebesar 24 persen (Watchlist, 2015). Kesenjangan antara jenis kelamin menunjukkan bahwa kurangnya pendidikan anak perempuan di RAT merupakan masalah penting dan akar dari kekerasan berbasis gender yang ada di RAT.

Hal tersebut membuktikan bahwa negara, melalui kontrolnya terhadap sistem pendidikan, merupakan wajah dari apa yang dimaksud dengan negara. Negara merepresentasikan masyarakat untuk menjelaskan bagaimana pemerintahan tersebut dipimpin dan seberapa pengaruh terhadap keadaan domestik. Semua peran ini dapat menjadikan negara sebagai aktor dalam konflik (Wallensten, 2002).

Lemahnya hukum untuk melindungi korban KSBG di RAT salah satunya disebabkan oleh Pemerintah RAT yang belum meratifikasi Protokol dalam Piagam Afrika tentang Hak Asasi Manusia dan Masyarakat tentang Hak-Hak Wanita di Afrika atau yang disebut dengan Protokol Maputo. Pemerintah juga belum mengadopsi aturan tentang bantuan hukum untuk menyediakan bantuan hukum kepada korban kejahatan yang tidak dapat membayar perwakilan hukum, termasuk korban kekerasan seksual (UNHCR, 2017). Kehadiran pemerintah di RAT tidak

menyeluruh, mereka hanya berfokus di wilayah Ibukota, Bangui. Wilayah lain seperti Batangafo yang berada di pebatasan utara RAT, tidak ada layanan kebutuhan dasar atau lembaga negara yang tersedia. Kota tersebut sepenuhnya dikuasai oleh kelompok pemberontak (Allison, 2017).

Warisan kolonial dan subordinasi ekonomi dan politik di RAT membuat struktur negara lemah. Negara yang tidak dapat hadir diluar ibukota berakibat negara gagal menyediakan layanan publik seperti keamanan, kesehatan dan pendidikan, Ketidakmampuan negara untuk mengirimkan barang publik menciptakan sistem tata kelola internal yang menjadi eksklusif, diskriminatif dan menghasilkan ketimpangan ekonomi dan politik.

B. Perempuan

Aktor yang kedua adalah perempuan. Dalam konflik yang terjadi di RAT, perempuan merupakan korban dari konflik dan KSBG. Sama seperti di beberapa negara berkembang lainnya, di RAT perempuan juga mendapatkan diskriminasi ekonomi dan sosial yang membuat pemberdayaan perempuan menjadi terhambat. Yang terjadi di RAT, perempuan yang tidak memiliki suami tidak dianggap sebagai kepala keluarga dan tidak mendapatkan subsidi keluarga yang seharusnya menjadi hak mereka (The Borgen Project, 2017).

Pada tahun 2014, seorang wanita, Catherine Samba-Panza, terpilih sebagai presiden sementara untuk memimpin negara tersebut. Meskipun seorang perempuan duduk dalam kursi kepresidenan, perempuan di RAT tetap tidak diikuti sertakan dalam rekonsiliasi dan perdamaian yang dibuat di negara tersebut (Mussau, 2015). Padahal harapan para perempuan disana untuk dapat keluar dari situasi konflik dan dapat kembali membangun kehidupan yang berkelanjutan dan aman, selain itu dapat mengatasi rasa takut dan trauma yang mereka alami. Perempuan juga tidak diberikan akses ekonomi, mereka tidak di izinkan untuk bekerja selama konflik tersebut berjalan karena adanya serangan dari kelompok-kelompok bersenjata.

Akses ke sekolah dasar yang tidak setara juga dirasakan anak perempuan dan laki-laki di RAT, dimana 65 persen anak perempuan terdaftar di tahun pertama

sekolah, angka ini akan menurun tajam menjadi 23 persen setelah kelas enam (The Borgen Project, 2017). Banyak anak perempuan meninggalkan sekolah pada usia remaja untuk menikah dan memiliki anak. Tingkat buta huruf perempuan juga jauh lebih tinggi daripada laki-laki. Menurut data dari *UN Women*, RAT juga tercatat sebagai negara dengan tingkat pernikahan anak tertinggi kedua di dunia, dimana 68 persen remaja perempuan menikah sebelum usia 18 dan 29 persen menikah sebelum usia 15 tahun (UN Women, 2018).

Perempuan juga rentan menjadi korban hukum adat yang diskriminatif, terutama di daerah pedesaan. Tidak adanya hukuman untuk pelaku perkosaan padahal yang terjadi satu dari tujuh wanita telah diperkosa oleh pasangan mereka maupun anggota keluarga. 22 persen perempuan menyebutkan bahwa mereka mengalami kerugian fisik dan pelecehan seksual (Mussau, 2015). Perempuan menjadi korban utama dalam KSBG yang terjadi akibat konflik tersebut. Hukum adat yang berlaku di RAT yang mengatur mengenai hak asasi manusia membenarkan bahwa perempuan merupakan masyarakat kelas dua yang membuat perempuan rentan menjadi korban dalam konflik yang terjadi.

Perempuan yang menjadi korban KSBG yang tidak melaporkan kepada Pemerintah maupun Organisasi Internasional disebabkan oleh ketakutan mereka, rasa malu, resiko penolakan dari pasangan maupun keluarga yang akan mereka terima, dan takut akan adanya pembalasan oleh pelaku. Pelaporan yang kurang juga diperparah karena kurangnya kepercayaan atau akses ke pengadilan dan tidak adanya otoritas negara yang tersedia di seluruh negara. Tidak adanya perlindungan terhadap korban dan adanya situasi yang tidak aman juga menghambat akses bantuan bagi para korban. Selain serangan seksual seperti pemerkosaan, perbudakan seks dan pernikahan paksa, perempuan dan anak perempuan juga semakin dipaksa dan beralih ke seks transaksional, juga disebut "*Survival Sex*", untuk memenuhi kebutuhan paling dasar keluarga mereka (UNHCR, 2017).

Faktor lain yang membuat korban KSBG tidak melapor disebabkan oleh rendahnya jumlah KSBG yang diselidiki, dituntut atau bahkan dilaporkan. Karena dari para korban sendiri enggan mengakui secara formal bahwa mereka merupakan korban KSBG. Para korban khawatir bahwa situasi akan semakin buruk ketika

keluarga atau komunitas mereka mengetahui bahwa mereka telah menjadi target KSBG, apalagi mengetahui bahwa yang melakukan memiliki kekuasaan penuh atas serangan yang dilakukan. Maka dari itu korban memilih untuk tetap diam dan tidak melaporkan. Banyak dari korban pemerkosaan yang ditinggalkan atau ditolak keberadaannya oleh suami atau keluarga. Konsekuensi dari KSBG bagi korban juga diperparah jika mereka harus menjalani aborsi diluar fasilitas medis yang sesuai karena adanya stigma terkait KSBG (UNSG, 2016).

C. Kelompok Pemberontak

Aktor yang ketiga adalah kelompok pemberontak. Terdapat beberapa kelompok pemberontak namun yang paling berkuasa di beberapa wilayah di RAT adalah kelompok pemberontak Seleka dan anti-balaka. Kelompok pemberontak tersebut menjarah seluruh kota, merusak bangunan sekolah, mencegah anak-anak mendapatkan pendidikan, dan melakukan kekerasan seksual (GCE, 2010).

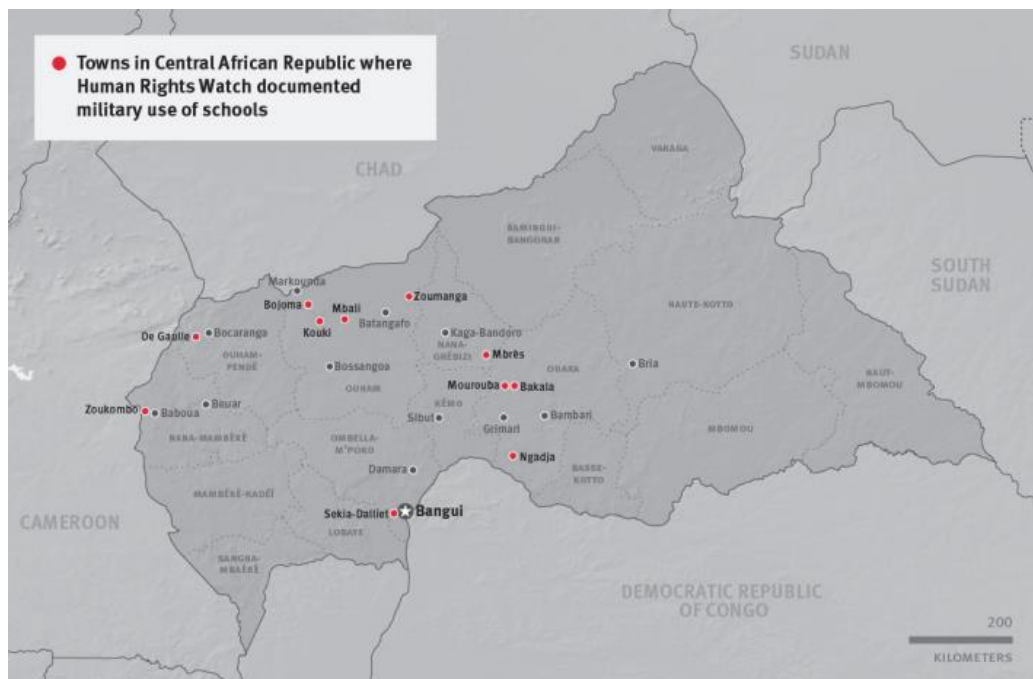
Sejak serangan yang dilakukan oleh kelompok pemberontak pada awal terjadinya konflik tahun 2013, pemimpin Seleka Michael Djotodia dapat berkuasa yang menyebabkan otoritas politik dan supremasi hukum melemah. Negara menjadi semakin tidak aman karena banyak terjadi penjarahan, penculikan, pemerkosaan, pembakaran gereja-gereja dan gedung-gedung pemerintahan. Kelompok pemberontak berusaha untuk menguasai negara dan sumberdaya yang ada didalamnya (Freedom House, 2013). Adanya perebutan kekuasaan antar kelompok pemberontak menjadi salah satu alasan terjadinya konflik di RAT. Negara yang seharusnya dapat melindungi warga negaranya, namun telah menjadi salah satu ancaman utama bagi keamanan dan kesejahteraan rakyat.

Seleka maupun anti-balaka melakukan hal yang sama sampai tidak ada lagi yang tersisa. Banyak sekolah yang diduduki berulang kali oleh kelompok pemberontak. Tindakan yang dilakukan para pemberontak tersebut membuat anak-anak di RAT tidak dapat melanjutkan pendidikan. Kelompok pemberontak melakukan penyerangan disebabkan oleh perilaku kelompok pemberontak lain yang mengancam diri mereka, dan menganggap bahwa yang dilakukan adalah kejam, kemudian mereka saling membalas kekerasan tersebut hingga kekerasan

tidak dapat dihindarkan lagi. Tindakan yang dilakukan oleh kelompok pemberontak tersebut merupakan bentuk perlindungan diri.

Menurut data dari PBB, sekolah yang diserang pada Agustus 2013 dan Februari 2014 sebanyak 17,5 persen dan 33 persen. Sedangkan pada April 2015, kelompok pemberontak tersebut secara khusus menargetkan institusi pendidikan untuk dilakukan penyerangan. Selama periode September-November 2014, mereka terus melakukan penyerangan untuk menghalangi kembalinya ke sekolah, yang merupakan simbol kembalinya normalitas dan stabilisasi (HRW, 2017).

Gambar 3.2 Sekolah yang mengalami serangan kelompok pemberontak



Sumber: Human Rights Watch, 2017

Pada gambar 3.2 merupakan peta wilayah dimana penyerangan terhadap sekolah yang dilakukan oleh kelompok pemberontak terjadi. Sekolah-sekolah yang dijarah oleh kelompok pemberontak sebagian besar mejanya telah dibakar sebagai kayu bakar, bahan bacaan yang ada disekolah tersebut juga sengaja dibakar. Selama konflik tersebut berjalan dari tahun 2013, sebanyak 400 sekolah telah ditutup akibat serangan (HRW, 2017). Selain itu, kelompok pemberontak bekerja sama untuk

mengancam dan menyerang para siswa dan guru ketika sedang perjalanan ke sekolah atau saat berada di sekolah.

Kelompok pemberontak Seleka dan anti-Balaka juga melakukan kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak-anak di RAT dari awal konflik pada tahun 2013. Kekerasan yang dilakukan termasuk pemerkosaan, perbudakan seksual, penyerangan fisik, KSBG, penculikan terhadap perempuan dan anak perempuan antara usia 10 dan 75 tahun, terutama di wilayah Ibukota, Bangui dan di dalam dan sekitar kota Alindao, Bambari, Boda, Kaga-Bandoro dan Mbrès (HRW, 2017). Kelompok pemberontak melakukan kekerasan seksual sebagai bentuk hukuman bagi perempuan dan anak perempuan, mereka menggunakan cara tersebut sebagai taktik perang. Perempuan menjadi korban dari konflik tersebut, seperti yang terjadi ketika kelompok pemberontak anti-balaka menjarah Bangui kemudian membawa perempuan dan anak perempuan dari kelompok pemberontak Seleka, kemudian memperkosa didepan suaminya. Hal tersebut juga dilakukan sebaliknya oleh kelompok pemberontak Seleka, mereka menyerang dan memperkosa korban sampai 9 bulan. Mereka diperkosa dengan menggunakan pecahan dari botol bir, jika mereka melawan, mereka diancam akan dibunuh oleh kelompok pemberontak tersebut (HRW, 2017).

Kelompok pemberontak juga menguasai satu wilayah di perbatasan utara RAT, Kota Batangafo. Kota tersebut merupakan yang terparah karena tidak adanya kehadiran pemerintah. Kota tersebut terpecah, satu sisi disepanjang sungai berada di bawah perlindungan kelompok pemberontak Seleka. Sisi lain Batangafo dikendalikan oleh kelompok anti-balaka. Kedua kelompok bertahan hidup dengan meminta pajak secara paksa dan meneror warga sipil yang berada di wilayah yang diklaim dilindungi oleh keduanya. Gencatan senjata yang dilakukan oleh kedua kelompok tersebut menyebabkan trauma berkepanjangan bagi warga sipil, yang kemudian mereka pergi dan meninggalkan beberapa wilayah di kota tersebut. Kelompok pemberontak tersebut juga menargetkan perempuan dan anak-anak yang menyebabkan banyak perempuan dan anak-anak yang terbunuh akibat serangan tersebut. (Allison, 2017).

3.2. Pemerkosaan sebagai Strategi Perang di Republik Afrika Tengah

Perempuan di RAT digunakan sebagai strategi perang antar kelompok pemberontak. Pemerkosaan menjadi bentuk paling umum yang digunakan oleh kelompok pemberontak dalam melemahkan perempuan dan musuhnya. Pemerkosaan merupakan akar dari adanya ketidaksetaraan, diskriminasi dan dominasi laki-laki. Patologi hubungan gender, seksualitas dan budaya sejatinya saling memiliki ketergantungan. Gagasan mengenai budaya, setidaknya sebagian, ditentukan oleh pemahaman tentang gender, peran gender, dan kekuasaan. Teori-teori yang didasarkan pada hubungan gender, seksual dan budaya menempatkan tiga kekuatan utama yang memotivasi terjadinya pemerkosaan masa perang. Selain itu, adanya ketidaksetaraan gender juga memfasilitasi adanya kekerasan terhadap perempuan. Menekankan hubungan kekuasaan, inferioritas perempuan lebih lanjut dengan adanya adat, praktik dan peraturan perundang-undangan yang mendiskriminasi perempuan. Adanya feminisasi kemiskinan yang kemudian melegitimasi kekerasan berbasis gender. Khususnya pandangan subordinasi perempuan yang mendorong penggunaan pemerkosaan sebagai senjata perang (Enloe, 2000).

Secara khusus, teori pemerkosaan berpendapat bahwa pemerkosaan digunakan sebagai taktik untuk mencapai tujuan yang lebih besar. Idennya adalah bahwa perang meningkatkan peluang pemerkosaan melalui perubahan (pengurangan) dalam norma-norma sosial, perubahan dalam kemauan atau kemampuan untuk menghukum para pelanggar, dan peningkatan kontak dengan para calon korban (dengan secara paksa memasuki rumah-rumah untuk penjarahan, atau melalui kamp-kamp pengungsian) (Wood, 2006).

Teori pemerkosaan berpendapat bahwa pemerkosaan digunakan oleh militer sebagai taktik untuk mencapai tujuan yang lebih besar. Digunakan dengan cara ini, pemerkosaan biasanya dilakukan oleh kelompok bersenjata yang terorganisir dengan baik di bawah perintah untuk menyerang warga sipil dalam upaya untuk memenuhi tujuan perang (Wood, 2006).

Selain itu, teori ini menyiratkan bahwa pemerkosaan hanya akan digunakan di beberapa titik dalam konflik, yang tidak menjelaskan tingkat pemerkosaan yang

terus-menerus tinggi yang digunakan oleh beberapa kelompok. Teori ini setuju bahwa pemerkosaan yang terjadi pada masa perang sering kali didasarkan pada efek buruk yang ditimbulkannya terhadap populasi musuh, termasuk penanaman teror, berkurangnya perlawanan sipil, penghancuran moral, penghinaan, penghancuran tentara musuh, dan sebagai akhir dari *ethnic cleansing* dan genosida.

Kekerasan yang dilakukan oleh kelompok bersenjata seperti pemerkosaan geng, penculikan yang bertujuan untuk perbudakan seksual, *female genital mutilation* dengan menggunakan senjata. Menurut data dari *Human Rights Watch*, kelompok Anti-balaka di RAT menggunakan pemerkosaan untuk menghalangi perempuan Seleka dari kegiatan ekonomi, misalnya ketika mereka berjualan di Pasar Ramandji mereka dihadang oleh kelompok anti-balaka yang kemudian mereka diperkosa. Selain pemerkosaan, wanita dari kelompok Seleka menjadi korban penculikan dan pernikahan paksa oleh Anti-balaka di beberapa wilayah seperti Bangui, Bouar, dan daerah lain yang terkena konflik. Beberapa perempuan juga ditahan di kamp militer yang kemudian hamil akibat dari perbudakan seksual (HRW, 2015). Hal ini merupakan bentuk “hukuman” yang diperoleh perempuan karena menjadi bagian dari kelompok musuh. Kemudian, reaksi balasan dilakukan oleh 6 orang dari kelompok Seleka dengan memperkosa seorang wanita berusia 26 tahun ketika mereka mengetahui bahwa perempuan tersebut berasal dari kelompok Anti-balaka.

Sejak Juni 2014, berbagai serangan di dan sekitar Bambari, ibu kota provinsi Ouaka, telah menyebabkan pemindahan massal warga sipil serta cedera dan kematian. Pada Juni dan Juli 2014, kontrol Bambari terpecah antara pasukan Seleka dengan RPRC (*Rassemblement Patriotique pour le Renouveau de Centrafrique*), dipimpin oleh Jenderal Joseph Zoundeko, yang diangkat sebagai komandan militer Seleka yang saat itu bersatu pada Mei 2014, dan Persatuan Perdamaian di Republik Afrika Tengah (UPC), yang Jenderal Ali Darassa Mahamant diciptakan pada September 2014 dengan dirinya sebagai presiden dan panglima umum (HRW, 2017). UPC memegang kendali atas bagian-bagian provinsi Ouaka. UPC Darassa berulang kali melakukan pemerkosaan menargetkan warga sipil yang mereka yakini bersekutu atau berafiliasi dengan anti-balaka.

Pada 9 Juni 2014, kelompok pemberontak Seleka dan etnis Peuhl menyerang Liwa, sebuah desa yang sebagian besar beragama Kristen dan anti-balaka 10 kilometer selatan Bambari. Para saksi dan anggota keluarga korban melihat para pejuang menembak dan membacok orang hingga mati ketika mereka berusaha melarikan diri. Seluruh desa dari 169 rumah hancur. Kelompok pemberontak Seleka menyerang Liwa memicu siklus serangan balasan di komunitas anti-balaka, yang memuncak dalam serangan Seleka terhadap lingkungan Kristen di Bambari pada akhir Juni yang menewaskan sedikitnya 32 orang (HRW, 2015).

Pada tanggal 7 Juli, para pejuang Seleka menyerang Paroki Saint Joseph Bambari, tempat ribuan pengungsi telah berlindung, menewaskan sedikitnya 27 orang. Terdapat 14 kasus di mana pejuang Seleka menahan wanita sebagai budak seksual di sekitar Bambari antara akhir 2013 dan akhir 2015. Tujuh korban mengatakan bahwa Seleka mengambil mereka dari lingkungan Kidigra di Bambari selama serangan di akhir Juni dan awal Juli 2014, dan satu mengatakan dia ditahan oleh Seleka di lingkungan itu.

Seleka menahan para wanita, yang saat itu berusia antara 20 sampai 73 tahun, untuk periode mulai dari tiga hari hingga lebih dari setahun. Setidaknya terdapat 89 perempuan dan gadis lain yang ditahan bersama yang mengalami kekerasan seksual dan kerja paksa. Semua wanita diperkosa oleh banyak pria, seringkali berulang kali pada hari yang berbeda. Dua korban menggambarkan bagaimana kelompok pemberontak memperkosa ketika mereka berputar melalui pangkalan di mana para wanita ditahan. Satu orang mengatakan kepada bahwa pada hari pertamanya di penangkaran, sekitar 15 pria memperkosanya dan empat wanita lainnya.

Terdapat 26 wanita dan anak perempuan yang ditahan sebagai budak seksual oleh anti-balaka antara Desember 2013 dan April 2016, terutama di Bangui dan Boda (HRW, 2017). Seperti orang-orang yang menderita perbudakan seksual oleh Seleka, mereka diperkosa berulang-ulang, sering kali dengan beberapa penyerang, serta pemukulan, penghinaan, dan diambil karena perempuan tersebut merupakan “istri” dari Seleka.

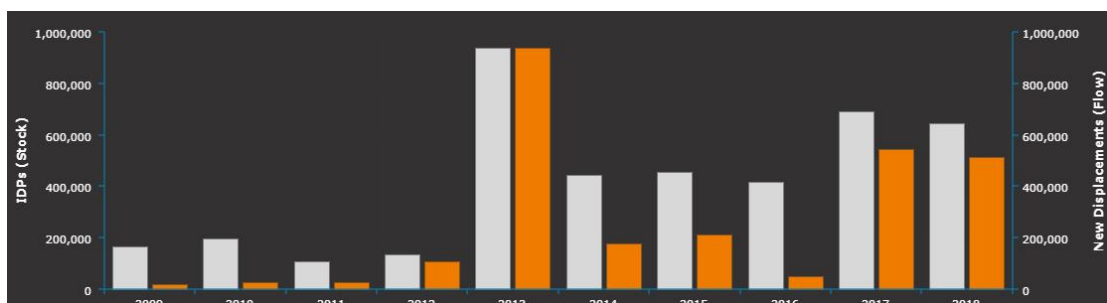
Anti-balaka menampung lima wanita, termasuk anak perempuan berusia 12 tahun, sebagai budak seksual di dalam dan sekitar Boda, sekitar 100 kilometer barat Bangui, di mana anti-balaka memiliki pangkalan terkenal di dekat misi Katolik. Kasus-kasus di mana anti-balaka menahan enam perempuan dan anak perempuan sebagai budak seksual di Bangui yang merupakan wanita muslim dan salah satunya hamil pada saat itu. Seperti yang dilakukan oleh Seleka, anggota anti-balaka menargetkan wanita karena afiliasi agama mereka atau kerabat mereka. Anti-balaka akan membawa perempuan muslim karena suaminya Muslim.

Perempuan-perempuan yang diperkosa juga akan mengalami penolakan dari anggota keluarga bahkan dari suami mereka karena asumsi sosial yang membudaya mengenai identitas dan sifat perempuan. Ketika perempuan di RAT mengalami pemerkosaan, mereka lebih mungkin disalahkan oleh pria dan wanita lainnya. Seluruh keluarganya akan merasa tidak terhormat dan malu karena telah kehilangan martabat yang dipercayainya. Keluarga atau komunitasnya dapat secara tidak langsung menambah penganiayaan dan trauma yang dideritanya melalui tanggapan mereka kepadanya. Kelompok pemberontak melakukan pemerkosaan kepada perempuan dan anak perempuan memberikan efek jangka panjang yang dirasakan oleh mereka termasuk penyakit dan cedera, kehamilan yang tidak diinginkan, hilangnya mata pencaharian dan akses ke pendidikan. Perempuan dan anak perempuan juga sulit untuk mendapatkan akses perawatan medis dan psikososial dasar setelah pemerkosaan.

Komandan dari kedua kelompok pemberontak juga seakan telah mentolelir kekerasan seksual yang dilakukan oleh pasukan mereka, terlihat dalam beberapa kasus justru kepala kelompok pemberontak yang meminta pasukannya untuk melakukan pemerkosaan. Anggota kelompok pemberontak melakukan pemerkosaan selama serangan yang dilakukan di kota-kota dan desa. Seleka dan anti-balaka dengan dugaan bahwa perempuan dan anak perempuan merupakan bagian dari salah satu kelompok, dengan pejuang Seleka yang mayoritas Muslim menargetkan perempuan dan anak perempuan dari komunitas Kristen, dan anti-balaka menargetkan perempuan dan gadis Muslim (HRW, 2015).

Dampak lain yang ditimbulkan dari banyaknya kasus pemerkosaan dan kekerasan seksual berbasis gender di RAT adalah terjadinya perpindahan penduduk secara besar-besaran. Perempuan yang hak-haknya tidak dapat dilindungi oleh pemerintah memilih untuk melarikan diri dari negara tersebut dengan harapan mereka mendapatkan perlindungan dan tempat yang aman terhindar dari kelompok bersenjata. Para perempuan ini merupakan korban dari pemerkosaan dan kekerasan seksual berbasis gender (KSBG). Sebagian besar korban tidak dapat mengakses layanan kesehatan, dukungan psiko-sosial dan layanan kebutuhan dasar lain atau enggan melakukannya karena adanya stigma dan budaya diam yang ada di negara ini yang akhirnya membuat mereka mencari akses dinegara lain. Berikut ini akan ditampilkan data mengenai jumlah peningkatan *Internally Displaced Persons* (IDPs) di RAT dari sebelum terjadinya konflik sampai sekarang.

Gambar 3.3 Grafik *Internally Displaced Persons* (IDPs) di RAT



Sumber: *Internal Displacement Monitoring Centre* (IDMC), 2018.

Pada gambar 3.5 terlihat bahwa sebelum terjadinya konflik penduduk di RAT masih berada di dalam negara tersebut dan hanya beberapa yang melakukan perpindahan, sampai akhirnya kudeta terjadi pada Maret 2013, sekitar 20% dari populasi negara tersebut melakukan perpindahan dalam skala besar, baik di dalam maupun di luar perbatasan RAT dan hingga tahun 2015 diperkirakan terdapat 426.200 pengungsi internal (IDP) di negara ini. Ada 82.500 di prefektur Ouham, 64.800 di Ouaka, 58.700 di Bangui dan 48.400 di Ombella M'Poko. Terdapat sekitar 457.480 warga negara RAT yang berada di negara-negara tetangga pada pertengahan 2015 (IDMC, 2018). Penurunan perpindahan yang dilakukan pada tahun 2016 menurun karena adanya upaya rekonsiliasi nasional pemerintahan baru yang diharapkan akan berhasil. Namun, situasi memburuk lagi pada tahun 2017 dengan tingkat kekerasan dan perpindahan yang meningkat. Perpindahan tersebut

terus dilakukan sampai tahun 2018 meskipun telah ada inisiasi perdamaian (IDMC, 2018).

Jumlah *Internally Displaced Persons* (IDPs) di RAT 50% nya adalah perempuan (IDMC, 2018). Ketika perempuan mencoba mencari perlindungan dan akses kebutuhan dasar, namun mereka menemui resiko KSBG di lokasi pemindahan tersebut. Konflik yang terjadi telah memaksa para gadis dan perempuan muda yang terpaksa pindah untuk melakukan hubungan seksual dengan kelompok bersenjata agar mereka dapat bertahan hidup dengan imbalan makanan atau pekerjaan sementara. Dalam beberapa kasus, mengakibatkan kehamilan dibawah umur atau kehamilan yang tidak diinginkan. Namun jumlah korban yang mengalami KSBG di lokasi pemindahan tidak pernah dipublikasi (IDMC, 2015). Sedangkan laki-laki tidak dapat mencegah atau melindungi perempuan untuk diperkosa atau ketika menghadapi kekerasan seksual, karena mereka dapat sewaktu-waktu dibunuh oleh kelompok bersenjata.

Diskriminasi juga terjadi kepada perempuan di RAT dalam kepemilikan atas lahan. Perempuan di RAT dalam kepemilikan lahan bergantung pada hubungannya dengan laki-laki. Dokumen yang menunjukkan kepemilikan atau hak atas rumah dan tanah seringkali atas nama suami atau saudara laki-laki. Perempuan yang bercerai, lajang atau janda tidak dapat memiliki tanah atas nama mereka, perempuan hanya dianggap sebagai pengguna lahan bukan pemilik. Satu-satunya cara yang bisa dilakukan bagi perempuan di RAT untuk mengakumulasi asset HLP adalah tanah pewarisan yang mana hukum keluarga RAT tidak mendiskriminasi perempuan terkait dengan hak waris. Selain untuk melindungi hak atas tanah dan sumber daya lahan, kewarganegaraan diperlukan perempuan untuk memastikan integritas atas tubuh perempuan termasuk memperoleh hak-hak reproduktif seperti akses ke kontrasepsi serta kebebasan dari kekerasan fisik dan seksual. Menjamin kebebasan dari kekerasan adalah salah satu cara dimana perempuan di RAT berjuang untuk kesetaraan kewarganegaraan.

Bentuk-bentuk KSBG yang dialami oleh perempuan di RAT merupakan salah satu bentuk adanya ketidaksetaraan gender dan menjadi “subjek yang lebih rendah” dari warga negara. Dalam kaitannya dengan *Internally Displaced Persons*

(IDPs), perempuan yang terpaksa melakukan migrasi sebagian besar untuk menghindari kekerasan berbasis gender yang terjadi saat konflik, keamanan pangan dan hubungan kekuasaan yang tidak setara antara laki-laki dan perempuan.

Gender sering digunakan untuk menentukan bagaimana hak kewarganegaraan di distribusikan di rumah, masyarakat, nasional dan kelembagaan yang membuat perempuan memiliki banyak tanggung jawab tetapi sedikit sumber daya dan perwakilan. Undang-undang kewarganegaraan di Afrika secara umum dan eksplisit mendiskriminasi berdasarkan etnis, ras, jenis kelamin dan agama, dan perempuan menanggung beban atas ketidakadilan ini. Di Republik Afrika Tengah, undang-undang kewarganegaraan tercantum dalam *nationality code* 1961 yang di amandemen pada tahun 1984 (CRAI, 2015). Undang-undang kewarganegaraan ini tidak memberikan perempuan kemampuan untuk memberikan kewarganegaraan mereka kepada anak-anak mereka atas dasar kesetaraan dengan laki-laki. Perempuan RAT juga tidak dapat memberikan kewarganegaraannya kepada suami yang berkewarganegaraan asing atas dasar kesetaraan dengan laki-laki. Hal ini berdampak pada rendahnya pencatatan akta kelahiran selama konflik. Hal ini tidak sejalan dengan *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women* yang telah di ratifikasi RAT pada 21 Juni 1991 (OHCHR, n.d).

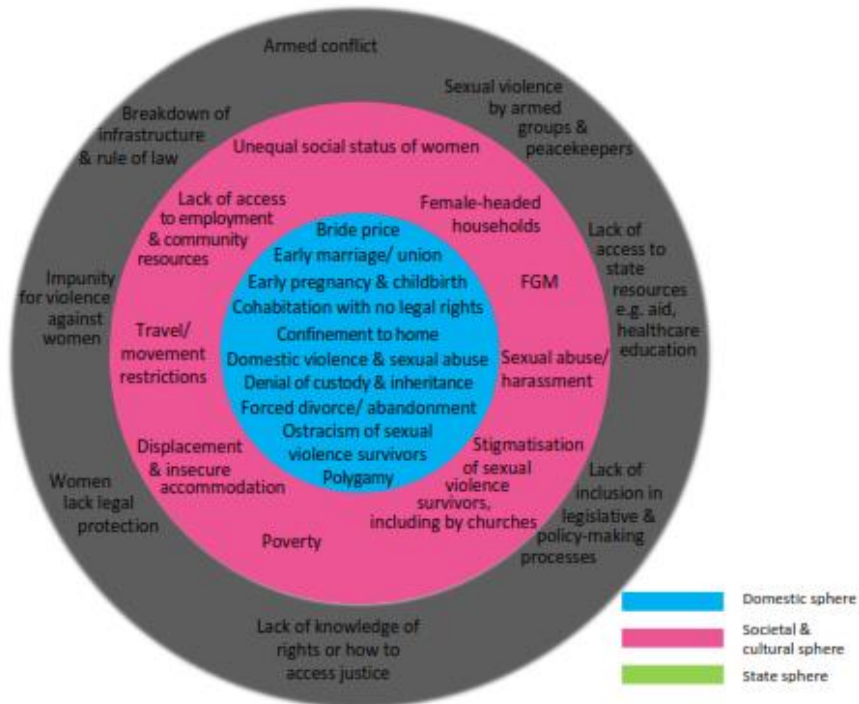
Hal ini berdampak pada anak-anak yang dilahirkan oleh perempuan di RAT banyak yang tidak memiliki akta kelahiran, angkanya cukup tinggi yaitu sebesar 70% atau sebanyak 35.000 anak tidak terdaftar selama konflik (UNICEF, 2015). Nantinya, anak-anak ini akan *stateless* karena tidak dapat memiliki kewarganegaraan. Karena peraturan ini juga, perempuan yang menjadi korban KSBG dan mengalami kehamilan yang tidak diinginkan, mereka tidak dapat mengurus akta kelahiran anaknya. Anak-anak yang dilahirkan dari ibu yang merupakan korban pemerkosaan, tidak dapat mengakses kebutuhan dasar seperti pendidikan dan kesehatan. Hak yang sama diberikan kepada anak-anak yang lahir di dalam dan di luar nikah telah diatur dalam Family Code 1997 yang di amandemen tahun 2010, namun tidak berjalan semestinya.

Masyarakat di mana perempuan dipandang sebagai properti atau hanya sebagai fungsi reproduksi yang menekankan tatanan sosial patriarkal memperkuat

dehumanisasi perempuan. Pemerintah sebagai aktor yang harusnya dapat melindungi perempuan dan anak perempuan dari kekerasan seksual tetapi dengan adanya konflik tersebut telah mengancurkan institusi-institusi negara, termasuk pengadilan dan fasilitas penahanan. Pihak berwenang tidak memiliki kapasitas untuk mencegah, menyelidiki, dan menuntut kekerasan seksual atau untuk memastikan ketersediaan layanan penting bagi para korban. Namun, pemerintah dan penyedia layanan lainnya tidak selalu mengambil semua langkah yang mungkin untuk memberikan bantuan yang diperlukan bagi para korban yang melaporkan kejahatan tersebut. Di negara di mana sistem peradilan sebagian besar tidak berfungsi — dengan hanya sedikit pengadilan operasional, sedikit pengacara dan hakim, dan kapasitas minimal untuk menyelidiki kekerasan seksual atau menahan pelaku — para korban memiliki sedikit atau tidak ada kesempatan untuk mencari keadilan. Meskipun KUHP Afrika Tengah menghukum pemerkosaan dan kekerasan seksual sebagai tindak pidana, tidak ada anggota kelompok bersenjata yang diadili karena pemerkosaan selama konflik. Hanya 11 dari 296 orang yang selamat dari kekerasan seksual yang mengatakan mereka berusaha untuk mengajukan pengaduan pidana (HRW, 2015).

Selain pemerkosaan dan KSBG, perempuan di Republik Afrika Tengah juga menghadapi berbagai tekanan dalam lingkup domestik, lingkup sosial dan budaya, dan lingkup negara. Berikut ini akan diberikan gambar mengenai area tekanan dan permasalahan yang dihadapi oleh perempuan di RAT.

Gambar 3.2. Area tekanan yang dihadapi oleh wanita di RAT



Sumber: *World Christian Database* (WCD), 2017.

Pada gambar 3.2 terlihat bahwa perempuan dihadapkan tidak hanya permasalahan budaya dan ekonomi, tetapi juga kekacauan tatanan sosial dan supremasi hukum yang disebabkan oleh ketidakstabilan politik dan konflik bersenjata. Posisi perempuan di RAT sangat rentan terkena diskriminasi. Menurut data dari *United Nation Development Program* (UNDP), RAT menempati peringkat 156 dari 188 negara pada *Gender Inequality Index* dan perempuan rentan mengalami diskriminasi pada setiap bidang kehidupan diperparah dengan konflik yang masih berjalan (UNDP, 2016). Gambar tersebut menyoroti beberapa masalah yang dihadapi perempuan di bidang domestik, sosial, budaya dan negara. Tidak ada lingkungan dimana perempuan sepenuhnya aman, dan situasi akan semakin buruk bagi perempuan dari kalangan minoritas.

Bentuk-bentuk KSBG yang dialami oleh perempuan di RAT merupakan salah satu bentuk adanya ketidaksetaraan gender dan menjadi “subjek yang lebih rendah” dari warga negara. Dalam kaitannya dengan *Internally Displaced Persons* (IDPs), perempuan yang terpaksa melakukan migrasi sebagian besar untuk

menghindari kekerasan berbasis gender yang terjadi saat konflik, keamanan pangan dan hubungan kekuasaan yang tidak setara antara laki-laki dan perempuan.

Setelah menganalisis kasus dari elemen konflik serta pemerkosaan sebagai taktik perang, maka dapat disimpulkan bahwa ini pemerintah RAT belum mampu untuk melindungi hak-hak perempuan dan anak perempuan. Faktor lain seperti budaya, lemahnya hukum, serta pemerkosaan yang digunakan dalam strategi perang semakin mempersulit keadaan yang dihadapi perempuan sehingga kasus KSBG meningkat.